



Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Sekolah dalam Upaya Membangun Budaya Akuntabilitas di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri

Widya Rizki Eka Putri¹, Einde Evana², Retno Yuni Nur Susilowati³, Rona Majidah^{4*}, Rialdi Azhar⁵

¹⁻⁵Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rona.majidah@feb.unila.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Februari 2026;

Revisi: 29 Maret 2026;

Diterima: 24 April 2026;

Terbit: 30 April 2026.

Keywords: Accountability; COSO; Financial Governance; Integrity Zone; Internal Control.

Abstract: This community service activity aims to strengthen the internal control system (ICS) in financial management at MAN 2 Bandar Lampung to foster a culture of accountability and support the development of an Integrity Zone (IZ) toward a Corruption-Free Area (WBK). The main problems faced by the partner include the absence of formal ICS and financial SOP documents, weak internal supervision, and low literacy in public accountability. Through participatory training and technical assistance, the program facilitated the preparation of ICS documents, financial Standard Operating Procedures (SOPs), and internal monitoring and evaluation (M&E) instruments based on the COSO framework and Ministry of Religious Affairs regulations. The results show a 32% improvement in participants' understanding of internal control, accountability, and segregation of duties. Furthermore, the partner successfully developed official ICS and SOP documents and drafted M&E instruments ready for implementation. This activity demonstrates that strengthening ICS through training and mentoring effectively enhances institutional capacity and human resources in realizing transparent, accountable, and sustainable financial governance as a foundation for establishing an Integrity Zone in the education sector.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat sistem pengendalian internal (SPI) dalam pengelolaan keuangan di MAN 2 Bandar Lampung guna membangun budaya akuntabilitas dan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Permasalahan utama mitra meliputi ketiadaan dokumen SPI dan SOP keuangan, lemahnya fungsi pengawasan internal, serta rendahnya literasi akuntabilitas publik. Melalui metode pelatihan partisipatif dan pendampingan teknis, kegiatan ini memfasilitasi penyusunan dokumen SPI, Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan, dan instrumen monitoring serta evaluasi (Monev) internal berbasis kerangka COSO dan regulasi Kementerian Agama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar $\pm 32\%$ pada aspek pengendalian internal, akuntabilitas, dan pemisahan fungsi keuangan. Selain itu, mitra berhasil menyusun dokumen SPI dan SOP keuangan serta rancangan instrumen Monev yang siap diimplementasikan. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan SPI melalui pelatihan dan pendampingan efektif meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mewujudkan tata kelola keuangan madrasah yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Zona Integritas di sektor pendidikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; COSO; Sistem Pengendalian Internal; Tata Kelola Keuangan; Zona Integritas.

1. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, satuan pendidikan, termasuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dihadapkan pada tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya bermutu secara akademik, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kementerian Agama sebagai pembina utama madrasah mendorong seluruh MAN untuk bertransformasi menjadi

lembaga yang menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Namun, implementasi ZI di satuan pendidikan secara nasional masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. Laporan Evaluasi Pembangunan ZI oleh Kementerian PANRB 2022 menunjukkan bahwa dari 4.402 satuan kerja yang mengusulkan ZI, hanya 9,4% yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, dan kontribusi sektor pendidikan masih tergolong kecil dibandingkan dengan sektor pelayanan langsung lainnya. Ini mencerminkan adanya gap antara komitmen formal dan kesiapan sistem pengendalian internal di satuan pendidikan. Laporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2022 mengungkap bahwa lebih dari 70% madrasah negeri belum memiliki sistem pengendalian internal (SPI) yang terdokumentasi secara lengkap, termasuk SOP pengelolaan dana BOS, dokumen monitoring anggaran, dan mekanisme pelaporan keuangan internal. Ketidakteraturan dokumentasi ini berdampak pada lemahnya praktik pengawasan internal, dan secara langsung memengaruhi indikator keberhasilan ZI, terutama pada area *penguatan pengawasan* dan *penataan tata laksana*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dahnelia et al., 2024) terhadap 25 sekolah negeri di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa hanya 28% kepala sekolah dan bendahara memahami hubungan antara pengendalian internal dan keberhasilan ZI, sedangkan sebagian besar lainnya menganggap ZI hanya sebatas pelaporan administratif tahunan. Selanjutnya, (Simanjuntak et al., 2024) menemukan bahwa 56% sekolah tidak memiliki forum monitoring dan evaluasi (monev) keuangan secara berkala, dan 68% tidak pernah melakukan audit internal terhadap pelaksanaan anggaran BOS.

Dari fakta-fakta tersebut, jelas bahwa implementasi ZI di sektor pendidikan, khususnya madrasah, menghadapi tantangan sistemik berupa minimnya sistem pengendalian internal yang kokoh dan lemahnya kapasitas pengawasan keuangan. Maka, penguatan SPI menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa ZI tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi terimplementasi dalam budaya kerja sehari-hari. Intervensi berbasis pelatihan, pendampingan, dan penyusunan dokumen SPI akan menjadi langkah konkrit untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memperkuat kapabilitas madrasah dalam membangun lingkungan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dijelaskan dalam literatur akuntansi publik sebagai rangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta keandalan pelaporan keuangan (Wahtan et al., 2025). Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) yang meliputi lima

komponen — lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan — sering dijadikan rujukan dalam penyusunan SPI sektor publik karena sifatnya yang komprehensif dan adaptif terhadap konteks organisasi (Fitriani & Destia, 2024). Implementasi SPI di satuan pendidikan bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana publik (mis. BOS/DAK) melalui pemisahan fungsi, dokumentasi prosedur, dan mekanisme monitoring yang sistematis (Inaya et al., 2025). Konsep-konsep ini menjadi landasan intervensi penguatan SPI pada MAN 2 Bandar Lampung.

Hasil pengamatan dan diskusi awal dengan pihak pengelola di MAN 2 Bandar Lampung mengungkapkan sejumlah permasalahan strategis yang menghambat pencapaian tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ZI, di antaranya: belum tersedianya sistem pengendalian internal yang terdokumentasi secara formal. Selama ini pengelolaan keuangan, khususnya terkait penggunaan dana BOS dan DAK, masih banyak bergantung pada kebiasaan dan inisiatif personal, bukan pada mekanisme tertulis yang baku (Nengsi et al., 2025). Hal ini berisiko memunculkan praktik pengelolaan yang tidak seragam dan sulit dipertanggungjawabkan. Sekolah yang tidak memiliki sistem pengendalian internal formal lebih rentan terhadap praktik fraud, kesalahan anggaran, dan temuan audit (Lestari & Dewi, 2020).

Selanjutnya, ditemukan bahwa belum ada pemisahan fungsi antara perencana, pelaksana, dan pengawas anggaran. Dalam beberapa kasus, individu yang sama merangkap beberapa fungsi, sehingga melemahkan prinsip *checks and balances* dalam pengendalian internal. Pentingnya pemisahan fungsi dan peningkatan literasi keuangan pengelola sekolah merupakan syarat keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan (Nafisa, 2024). Permasalahan lain yang dihadapi adalah minimnya monitoring dan evaluasi keuangan secara internal. Ditemukan bahwa fungsi pengawasan internal belum dijalankan secara sistematis dengan menggunakan indikator dan alat ukur kinerja keuangan yang sesuai dengan standar maupun peraturan. Minimnya kegiatan monitoring menyebabkan lemahnya deteksi dini terhadap penggunaan anggaran yang menyimpang (Amin, 2016). Salah satu hambatan utama pembangunan ZI adalah lemahnya pengawasan internal, yang tercermin dari tidak adanya forum evaluasi keuangan bulanan, ketiadaan pelaporan berbasis indikator, serta tidak adanya tim audit internal sekolah (Himayaturrohman, 2019).

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya berimplikasi pada efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian ZI. Studi yang dilakukan oleh Hapsari et al. (2019) menemukan bahwa ketidaklengkapan dokumentasi proses dan lemahnya fungsi pengawasan internal adalah penghambat utama pencapaian WBK/WBBM. Tanpa

sistem pengendalian internal yang kuat, madrasah akan sulit memenuhi indikator keberhasilan ZI, seperti penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi (Biahimo et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Azkiyah & Fuad (2024) menemukan bahwa kurangnya kapasitas pengelola keuangan sekolah di Provinsi Lampung menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi manajemen berbasis kinerja dan tata kelola yang akuntabel.

Dalam upaya pembangunan Zona Integritas, penguatan sistem pengendalian internal merupakan fondasi dari area perubahan penataan tata laksana dan penguatan pengawasan. Keberadaan dokumen SOP, mekanisme pelaporan, serta pola pengawasan keuangan yang jelas akan menjadi bukti nyata keseriusan madrasah dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bebas dari potensi penyimpangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah kegiatan pengabdian yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga pada pendampingan langsung dalam menyusun dan menerapkan sistem pengendalian internal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat pondasi akuntabilitas, meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, dan mendukung MAN 2 Bandar Lampung dalam mewujudkan Zona Integritas secara bertahap dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif melalui tahapan yang sistematis, yang mencakup: perumusan masalah, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi dan keberlanjutan program. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan madrasah yang bersifat kelembagaan (non-produktif secara ekonomi) (Zunaidi, 2024), khususnya pada aspek penguatan sistem pengendalian internal, akuntabilitas keuangan, dan pembangunan zona integritas di satuan pendidikan. Tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

Tahap Perumusan Masalah

Tim pengabdian melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen keuangan MAN 2 Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang berbasis pada data lapangan yang valid dan sesuai dengan kebutuhan institusi mitra. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain: tidak adanya dokumen SPI dan SOP tertulis, lemahnya fungsi pengawasan internal, rendahnya literasi keuangan, serta ketiadaan instrumen monitoring. Hasil kajian ini menjadi dasar penyusunan solusi kegiatan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan pendekatan sinkronisasi antara teori dan praktik. Sebelum memasuki sesi kegiatan, tim pengabdian akan melakukan pre-test kepada seluruh peserta untuk mengukur pengetahuan awal peserta terhadap materi kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama yang difokuskan pada penyampaian materi konseptual yang disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus ringkas dari praktik keuangan di madrasah. Setelah sesi teori, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis penyusunan dokumen SPI dan SOP secara partisipatif. Tim pengabdian membagi peserta ke dalam kelompok kerja untuk menyusun dokumen kebijakan SPI, SOP pengelolaan keuangan, dan *flowchart* prosedur operasional. Peserta juga diarahkan untuk membuat pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan prinsip segregation of duties dalam bentuk RACI Matrix. Tim pengabdian menyediakan template dokumen, contoh dokumen referensi, serta panduan teknis penyusunan dokumen agar proses lebih efisien. Di akhir kegiatan, dilakukan presentasi hasil penyusunan oleh masing-masing kelompok, diikuti dengan sesi umpan balik dan penyempurnaan bersama kepala madrasah.

Pelatihan Penyusunan Instrumen Monev Internal

Pelatihan dilakukan secara intensif dalam satu hari penuh, dengan membagi kegiatan ke dalam dua sesi utama, yaitu sesi teori dan sesi praktik. Sebelum memasuki sesi kegiatan, tim pengabdian akan melakukan pre-test kepada seluruh peserta untuk mengukur pengetahuan awal peserta terhadap materi kegiatan. Kemudian sesi teori dimulai dengan penyampaian materi pengantar konsep monitoring dan evaluasi internal dalam satuan pendidikan melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Selanjutnya, sesi praktik difokuskan pada praktik penyusunan dan pengujian instrumen monev oleh peserta. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan didampingi oleh tim pengabdian untuk menyusun format checklist, formulir evaluasi, dan laporan tindak lanjut. Dalam kegiatan ini, masing-masing kelompok melakukan simulasi penggunaan instrumen monev internal terhadap studi kasus atau data keuangan tahun sebelumnya yang disediakan oleh madrasah. Setelah penyusunan, setiap kelompok mempresentasikan hasil instrumen yang telah dibuat dan mendapatkan umpan balik dari peserta lain dan tim pengabdian.

Pelatihan Literasi Keuangan Sekolah Berbasis Akuntabilitas Publik

Pelatihan dilaksanakan dalam satu hari penuh dan terbagi ke dalam dua sesi utama: sesi teori dan sesi praktik. Sebelum memasuki sesi kegiatan, tim pengabdian akan melakukan pre-test kepada seluruh peserta untuk mengukur pengetahuan awal peserta terhadap materi kegiatan.

Pada sesi teori penyampaian materi dilakukan secara interaktif, dengan penyajian berupa ceramah, diskusi kelompok kecil, dan studi kasus riil dari madrasah. Pada sesi praktik, peserta diarahkan untuk melakukan simulasi dan praktik pencatatan keuangan sederhana melalui pengisian format dokumen keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan (SPJ). Selanjutnya peserta diminta untuk berdiskusi kelompok dalam mengidentifikasi risiko-risiko keuangan yang umum terjadi di lingkungan madrasah dan strategi pencegahannya.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Metode evaluasi yang digunakan mencakup pendekatan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses kegiatan berlangsung melalui observasi langsung, sesi tanya jawab, serta umpan balik lisan dari peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika pembelajaran, kendala yang muncul di lapangan, serta respons peserta terhadap materi dan metode yang digunakan (Nurjanah & Adawiyah, 2025). Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir kegiatan dengan menggunakan beberapa instrumen, antara lain:

Pre-test dan Post-test

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, seperti prinsip SPI, akuntabilitas keuangan, serta penyusunan instrumen monitoring dan SOP keuangan. Skor pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif untuk melihat sejauh mana peningkatan kompetensi peserta setelah pelaksanaan kegiatan.

Kuesioner Kepuasan dan Umpan Balik Peserta

Peserta diminta mengisi kuesioner tertulis terkait kepuasan terhadap materi, fasilitator, penyajian, metode pelatihan, serta kebermanfaatan materi bagi pekerjaan sehari-hari. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas penyelenggaraan kegiatan.

Validasi Luaran oleh Pihak Madrasah dan Tim Pengabdian

Dokumen hasil pendampingan seperti dokumen SPI, SOP, dan instrumen monev akan ditinjau bersama untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebutuhan MAN 2 Bandar Lampung. Validasi dilakukan melalui forum diskusi akhir dan sesi revisi terbimbing.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, kegiatan ini akan diakhiri dengan penyerahan seluruh hasil kegiatan dalam bentuk dokumen cetak dan digital kepada kepala madrasah. Selain itu, tim pengabdian akan mendorong pengesahan dokumen-dokumen tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah, agar dapat digunakan secara resmi dalam operasional madrasah. Setelah kegiatan pengabdian berakhir, pengabdian merencanakan tindak lanjut yang meliputi:

a. Monitoring (1–3 Bulan Pasca Kegiatan)

Tim pengabdian akan melakukan kunjungan atau koordinasi daring secara berkala kepada MAN 2 Bandar Lampung untuk meninjau implementasi dokumen SPI dan SOP dalam operasional madrasah; memastikan bahwa instrumen monitoring dan evaluasi keuangan telah digunakan oleh Tim Pengendali Internal (TPI) yang dibentuk, serta memberikan konsultasi teknis jika terdapat kendala dalam pelaksanaan evaluasi keuangan internal.

b. Penyusunan dan Publikasi Artikel Ilmiah

Berdasarkan proses dan hasil kegiatan, tim pengabdian akan menyusun artikel ilmiah untuk dipresentasikan dalam seminar hasil pengabdian tingkat nasional atau internasional dan dipublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat terindeks Sinta

c. Pengembangan Program Lanjutan

Tim pengabdian juga merencanakan pengajuan proposal lanjutan berupa pelatihan Audit Internal Sekolah berbasis Risiko. Program ini akan membekali Tim Pengendali Internal (TPI) dan manajemen madrasah dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko keuangan yang muncul dalam siklus anggaran

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 September 2025, bertempat di MAN 2 Bandar Lampung sebagai mitra pelaksanaan program. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Madrasah, Bendahara, para pengelola dana BOS, serta perwakilan guru yang memiliki peran strategis dalam proses administrasi dan keuangan madrasah. Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.30 WIB dengan rangkaian agenda yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan penguatan sistem pengendalian internal keuangan sekolah. Kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang berisi sambutan dari Ketua Tim Pengabdian dan Kepala Madrasah. Dalam sambutan tersebut ditekankan pentingnya keberadaan sistem pengendalian internal sebagai fondasi akuntabilitas keuangan dan instrumen pendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan madrasah.

Setelah pembukaan, peserta mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai konsep sistem pengendalian internal (SPI), prinsip akuntabilitas keuangan, serta regulasi pengelolaan dana BOS dan DAK. Hasil *pre-test* ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk menyesuaikan strategi penyampaian materi sehingga pelatihan lebih tepat sasaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif yang difokuskan pada kerangka COSO dan penerapannya di satuan pendidikan, prinsip dan ketentuan dalam

PMA No. 84 Tahun 2022 serta Juknis BOS Kemenag terbaru, dan tahapan penyusunan dokumen SPI dan SOP keuangan madrasah. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, studi kasus singkat, dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap konteks praktis penerapan SPI di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. Penyampaian Materi.

Tahap berikutnya adalah pendampingan penyusunan dokumen SPI dan SOP keuangan madrasah. Peserta dibagi ke dalam kelompok kerja kecil untuk menyusun bagian-bagian dari dokumen sesuai bidang tugas masing-masing, seperti kebijakan umum pengelolaan keuangan, prosedur penganggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan keuangan. Tim pengabdian memberikan contoh format dokumen, *flowchart* prosedur, serta contoh kebijakan keuangan madrasah sebagai acuan teknis. Hasil kerja kelompok kemudian dipresentasikan dan dikaji bersama untuk mendapatkan masukan substantif. Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) sebagai alat bantu dalam mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan anggaran dan memperkuat fungsi pengawasan internal. Peserta memperoleh penjelasan mengenai komponen utama instrumen Monev dan dilatih menyusun rancangan *checklist* evaluasi, format laporan monev, serta form tindak lanjut hasil evaluasi. Namun, karena Tim Pengendali Internal (TPI) belum terbentuk di madrasah, instrumen tersebut masih berada pada tahap perancangan dan akan diimplementasikan setelah struktur kelembagaan pengawasan ditetapkan secara formal.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab.

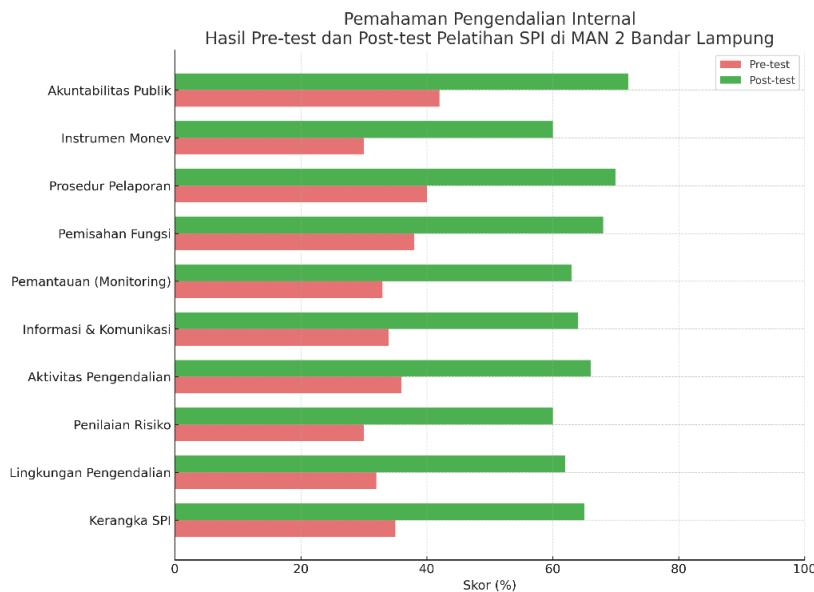
Kegiatan ditutup dengan penyerahan draf dokumen SPI, SOP, dan instrumen Monev kepada Kepala Madrasah sebagai bentuk komitmen awal dalam penguatan tata kelola keuangan. Tim pengabdian juga memberikan rekomendasi tindak lanjut berupa pembentukan TPI dan pengesahan dokumen melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah agar instrumen yang telah disusun dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam sistem keuangan madrasah.

Permasalahan utama yang diidentifikasi pada tahap awal, yaitu ketiadaan dokumen Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan, serta belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi, mulai dapat diatasi melalui kegiatan ini. Melalui rangkaian sesi pre-test, penyampaian materi, pendampingan penyusunan dokumen, hingga post-test, peserta memperoleh peningkatan pemahaman secara konseptual maupun teknis mengenai pentingnya SPI dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan satuan pendidikan.

Dari sisi substansi, kegiatan ini memperlihatkan adanya pergeseran pemahaman peserta dari praktik berbasis kebiasaan menuju praktik berbasis kebijakan dan prosedur tertulis. Sebelum pelatihan, sebagian besar proses penganggaran dan pelaporan keuangan di madrasah belum mengikuti alur pengendalian internal yang sistematis. Melalui pelatihan kerangka COSO dan pendampingan penyusunan SPI, peserta memahami pentingnya lima komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pemahaman ini tercermin dalam kemampuan peserta merancang struktur dokumen SPI dan SOP keuangan sekolah secara partisipatif, yang kemudian menjadi dasar pembentukan tata kelola keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata sebesar 32% dibandingkan dengan *pre-test*. Peningkatan ini terutama terlihat pada aspek pemahaman mengenai pemisahan fungsi, alur pelaporan, dan

prinsip akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan dana BOS dan DAK. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode pelatihan yang menggabungkan pendekatan teoritis dan praktik langsung dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam waktu relatif singkat. Selain itu, umpan balik peserta melalui kuesioner kepuasan menunjukkan bahwa materi pelatihan dinilai relevan dengan kebutuhan lapangan dan aplikatif untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.



Gambar 3. Hasil Evaluasi Pemahaman Pengendalian Internal.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga menyoroti adanya tantangan struktural, yaitu belum terbentuknya Tim Pengendali Internal (TPI) di madrasah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi instrumen monitoring dan evaluasi yang telah dirancang. Instrumen Monev masih berada pada tahap draft dan memerlukan dukungan kelembagaan formal agar dapat dijalankan secara konsisten. Pembentukan TPI menjadi prasyarat penting agar SPI dan SOP yang telah disusun tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam praktik keuangan madrasah sehari-hari.

Lebih jauh, kegiatan ini memberikan kontribusi strategis terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan madrasah. Dokumen SPI dan SOP yang dihasilkan menjadi elemen penting dalam memenuhi dua area perubahan utama pembangunan ZI, yaitu penataan tata laksana dan penguatan pengawasan (Lahiang et al., 2018). Ketersediaan dokumen tertulis, instrumen pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi fondasi yang krusial dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel (Utama et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjawab permasalahan teknis dalam pengelolaan

keuangan, tetapi juga mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama melalui satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal melalui pelatihan, pendampingan penyusunan dokumen, dan peningkatan literasi keuangan dapat menjadi katalisator perubahan kelembagaan. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan madrasah untuk menindaklanjuti hasil kegiatan melalui pengesahan dokumen, pembentukan TPI, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Keberlanjutan inilah yang akan menentukan apakah perubahan yang dimulai melalui kegiatan pengabdian dapat bertransformasi menjadi budaya kerja yang mapan dalam tata kelola keuangan madrasah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan di MAN 2 Bandar Lampung melalui peningkatan pemahaman pengelola keuangan terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal dan penyusunan dokumen pendukung yang sebelumnya belum tersedia. Melalui pelatihan partisipatif dan pendampingan teknis, tim pengabdian berhasil memfasilitasi penyusunan dokumen Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan, serta rancangan instrumen monitoring dan evaluasi. Peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar $\pm 32\%$ menunjukkan efektivitas kegiatan dalam membangun kapasitas SDM madrasah secara sistematis.

Keberhasilan kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di satuan pendidikan. Dokumen dan peningkatan kapasitas yang dihasilkan menjadi fondasi penting bagi madrasah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas sebagai prasyarat menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan kapasitas audit internal berbasis risiko sebagai tindak lanjut dari penyusunan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan SOP keuangan yang telah dilakukan. Program dapat mencakup pelatihan teknis bagi Tim Pengendali Internal (TPI) mengenai prinsip, metodologi, dan tahapan audit berbasis risiko sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, pendampingan penyusunan rencana audit tahunan berbasis risiko, serta simulasi pelaksanaan audit terhadap proses keuangan madrasah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan madrasah mampu menerapkan mekanisme pengawasan internal secara mandiri dan sistematis, sehingga efektivitas SPI dapat teruji dalam praktik dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. (2016). Implementasi manajemen strategis kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Serang. *Tarbawi*, 2(02), 42–57.
- Azkiyah, Z., & Fuad, N. (2024). Studi literatur: Transparansi keuangan sekolah terhadap partisipasi orang tua siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung*, 315–321.
- Biahimo, J., Wantu, S. M., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Transformasi zona integritas menuju birokrasi bebas korupsi: Tinjauan kebijakan dan strategi implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2288>
- Dahnelia, A., Nugraha, A. R. A., Putri, J. N. A., & Hariyoko, Y. (2024). Evaluasi kebijakan reformasi birokrasi di BBPMP Jatim terhadap pencapaian zona integritas, WBK, dan WBBM. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(11), 83–88.
- Fitriani, L., & Destia, S. (2024). Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal: Studi kasus pada Perguruan Tinggi Negeri X. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33197/bes.vol4.iss1.2024.2110>
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di BBWS Pemali Juana Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25–42.
- Himayaturohmah, E. (2019). Analisis problematika penerapan zona integritas di Balai Diklat Keagamaan Aceh, Bandung, Makassar dan Papua. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 4(2), 216–228. <https://doi.org/10.56971/jwi.v4i2.37>
- Inaya, F., Zakaria, A., & Prihatni, R. (2025). Analisis sistem pengendalian internal pengelolaan dana BOS pada SDN Waru 03. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(2), 284–294. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.07>
- Lahiang, M. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis kendala-kendala yang dihadapi satuan pengawasan internal dalam membangun zona integritas di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 9(1).
- Nengsi, Y. S., Maulidika, D., Sabri, A., & Hidayatullah, R. (2025). Pengelolaan keuangan sekolah: Sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam satuan pendidikan. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(1), 144–162.
- Nurjanah, I., & Adawiyah, N. R. (2025). Analisis efektivitas evaluasi formatif dan sumatif dalam evaluasi pembelajaran. *Kiswah: Jurnal of Islamic Studies and Education*, 1(1), 114–125.
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, 5(4), 6191–6197. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>

- Utama, Z. M., Syahbana, A. F., & Yosie, Y. (2025). Penerapan manajemen sumber daya manusia strategis dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah: Studi literatur. *Jurnal Pijar*, 3(3), 344–360.
- Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363–381. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.530>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.